

PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BANJARMASIN

Sustri Devi Yunita^{*1}, Sari Yanti², Nadya Novianty³, Analisa⁴
^{1,2,3,4} Universitas Sari Mulia

e-mail: ^{*1}sustriidevi@gmail.com, ²sari.yanti@unism.ac.id, ³nadya.novianty@unism.ac.id,
⁴lisaa1683@gmail.com

Received: 18 September 2024 Revised: 28 Desember 2024 Accepted: 29 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan populasi seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dengan sampel 46 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan kuesioner (angket) dengan teknik analisis *partial least square* (PLS). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t-statistik sebesar $0,119 < 1,96$ dan nilai *p-value* sebesar $0,905 > 0,05$, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t-statistik sebesar $2,007 > 1,96$ dan *p-value* sebesar $0,045 < 0,05$ dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai t-statistik sebesar $0,299 < 1,96$ dan nilai *p-value* sebesar $0,765 > 0,05$.

Kata kunci : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Abstract

This research aims to analyze internal control, regional financial accounting systems, and the use of information technology on the quality of financial reports at the Banjarmasin City Regional Financial and Asset Management Agency. This type of research uses associative research with a quantitative approach, with a population of all employees at the Banjarmasin City Regional Financial and Asset Management Agency with a sample of 46 people. The data collection technique used was a questionnaire with partial least squares (PLS) analysis technique. Based on the results of this research, it shows that the internal control relationship has no effect on the quality of financial reports with a t-statistic value of $0.119 < 1.96$ and a p-value of $0.905 > 0.05$, the regional financial accounting system has a significant effect on the quality of financial reports with The t-statistic value is $2.007 > 1.96$ and the p-value is $0.045 < 0.05$ and the use of information technology has no effect on the quality of financial reports with a t-statistic value of $0.299 < 1.96$ and a p-value of $0.765 > 0.05$.

Keywords : Utilization of Information Technology, Internal control, Quality of Financial Reports, Regional Financial Accounting System.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan representasi pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pelaporan keuangan akan menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pemerintah daerah terkait otonomi daerah. Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan sistem akuntansi pemerintah Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, maka sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual diterapkan (Hidayat *et al.*, 2021).

Menurut Lestari & Dewi (2020) laporan keuangan berfungsi sebagai sarana bagi suatu organisasi, dalam hal ini pemerintah untuk memberikan jawaban kepada masyarakat umum mengenai kinerja keuangannya. Laporan keuangan dari pemerintah harus mampu menyajikan data yang berkualitas. Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP), laporan keuangan yang dianggap berkualitas harus memiliki atribut relevan, keandal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Tuntutan masyarakat dapat dijadikan pedoman untuk membantu pemerintah daerah menjadi lebih baik dalam tata kelola pemerintahan (*good governance*), yang mana hal ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat memberikan laporan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap tahunnya, sebagai auditor pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan memperhatikan standar pelaporan keuangan yang sejalan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), yaitu kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan efektivitas pengendalian internal, maka penyajian kewajaran disajikan dalam bentuk opini. Menurut Koto (2019) BPK memberikan empat macam opini audit, yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar tanpa pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Ajeng & Wahdan, (2023) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai prosedur dan pedoman yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan atau aset organisasi atau lembaga, memastikan ketersediaan informasi akuntansi yang akurat, dan memastikan semua anggota staf mematuhi undang-undang yang relevan, aturan, dan pedoman pengelolaan. Untuk mencapai efisiensi, memberi manfaat, dan mencegah kerugian keuangan nasional, maka sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangatlah penting dan harus kita perhatikan agar dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Tim manajemen dan seluruh staf bekerja sama untuk memelihara sistem pengendalian internal, yang merupakan serangkaian prosedur dan aktivitas penting yang menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan aktual kalsel, Banjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam pemeriksaan tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-10 atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 yang mewakili Kalimantan Selatan. Dengan mendapatkan predikat tersebut, pemerintah menunjukkan efektivitasnya dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan yang berdampak pada masyarakat Kota Seribu Sungai (Sina, 2023).

Meski berturut-turut memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan di bidang pengelolaan keuangan daerah saat mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022, menurut sumber yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin. Permasalahan tersebut di antaranya adalah:

1. Kekurangan pendapatan dan kelebihan pembayaran yang perlu dikembalikan ke kas daerah.
2. Pengelolaan pajak daerah belum optimal dalam rangka meningkatkan

- pendapatan asli daerah.
3. Pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut sesuai dengan ketentuan pembelian melalui penyedia.
 4. Pengelolaan aset tetap belum tertib.
 5. Retribusi sewa alat dan peralatan pertanian yang belum dibayar dan tertunda.
 6. Serta lemahnya pengendalian internal atas pengelolaan dan pemungutan retribusi sewa alsintan.

Dari permasalahan di atas, fenomena yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tidak sesuai nya laporan keuangan yang disusun dengan standar yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan laporan keuangan tidak berkualitas. Selain itu penelitian mengenai pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi masih jarang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Padahal, berdasarkan laporan BPK, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin sering memperoleh WTP secara berturut-turut.

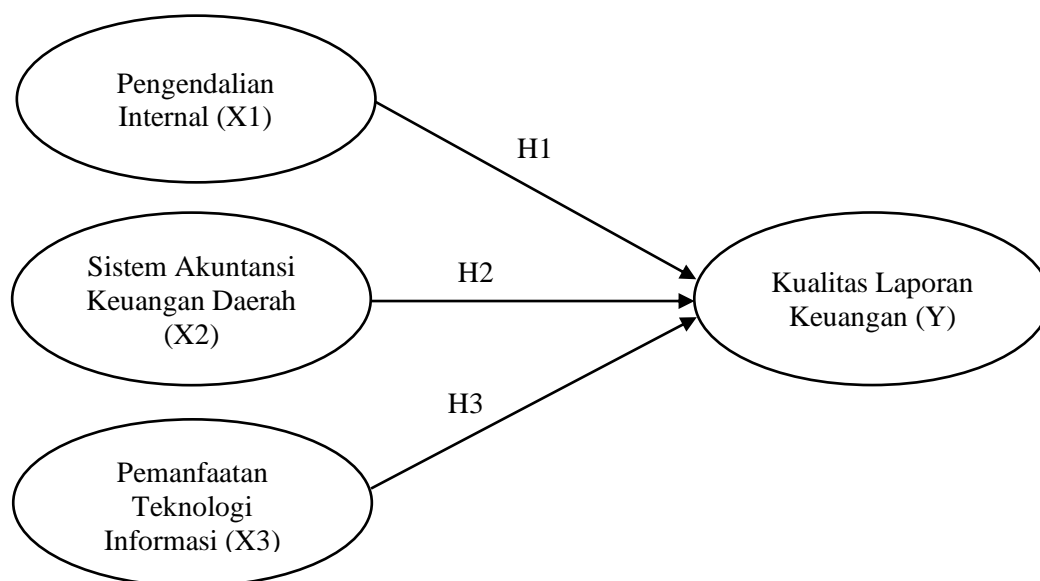
Sistem pengendalian internal adalah sebagai prosedur dan pedoman untuk mencegah penyalahgunaan aset organisasi, memastikan akurasi informasi akuntansi, dan kepatuhan terhadap hukum (Ajeng & Wahdan, 2023). Penelitian Ramadhanti & Rufaedah (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Bandung Barat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik pada suatu organisasi maka akan membuat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan dapat terbebas dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun. Penerapan pengendalian internal yang baik akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan, serta akan meningkatkan kepercayaan dari pihak yang berkepentingan.

Menurut Peraturan Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses yang meliputi pencatatan, pendataan, dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penelitian Jauhari *et al.*, (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem akuntansi keuangan daerah yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan baik dalam pengelolaan maupun pelaporan laporan keuangan. Ini dibuktikan dari indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, dan analisis data dengan berbagai cara menggunakan aplikasi (perangkat lunak) untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas yang tinggi dikenal dengan pemanfaatan teknologi informasi (Tangko *et al.*, 2019). Penelitian Heinrich *et al.*, (2023) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Kaimana.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual



Sumber : data diolah (2024)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, didasarkan pada latar belakang dan kerangka konseptual yang telah dikembangkan di atas adalah sebagai berikut:

H1: Pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM Bandarmasih Banjarmasin, Nomor 17, Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70654. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin yang berjumlah 80 orang. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan menentukan kriteria dari jumlah populasi, sehingga didapat 46 orang yang memenuhi kriteria.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah suatu metode merumuskan suatu permasalahan penelitian yang menyelidiki hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, dan varians. Analisis inferensial menggunakan SEM berbasis *partial least square (PLS)*. *Partial Least Squares (PLS)* yang meliputi tiga tahapan: analisis *outer model*, analisis *inner model* dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis

dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan 1,96 untuk alpha 5%, serta nilai probabilitas, di mana H_a diterima jika t-statistik $> 1,96$ atau $p < 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Tabel 1. Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
31 s/d 40 Tahun	19	41,31%
41 s/d 50 Tahun	27	58,69%
Total	46	100%

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas didominasi dengan responden yang berusia 41 s/d 50 tahun sebanyak 27 responden atau (58,69%) dan yang berusia 31 s/d 40 tahun sebanyak 19 responden atau (41,31%).

Tabel 2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	25	54,34%
Perempuan	21	45,65%
Total	46	100%

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas didominasi dengan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 responden atau (54,34%) dan perempuan sebanyak 21 responden atau (45,65%).

Tabel 3. Berdasarkan Masa kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
4 tahun	2	4,34%
9 tahun	2	4,34%
10 tahun	2	4,34%
12 tahun	3	6,52%
14 tahun	11	23,91%
15 tahun	12	26,08%
16 tahun	4	8,69%
18 tahun	1	2,17%
19 tahun	7	15,21%
20 tahun	2	4,34%
Total	46	100%

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas didominasi dengan pegawai yang bekerja selama 15 tahun sebanyak 12 responden atau (26,08%).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
PI (X1)	46	4.000	5.000	4.521	0.235
SAKD (X2)	46	4.000	5.000	4.734	0.247
PTI (X3)	46	4.000	5.000	4.686	0.221
KLK (Y)	46	4.000	5.000	4.778	0.410
Total	46				

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari jumlah responden (n) sebanyak 46 orang, dengan nilai minimum pada variabel pengendalian internal sebesar 4.000 dan nilai maksimum sebesar 5.000. Nilai rata-rata adalah 4.521 dan nilai standar deviasi adalah 0.235. Nilai minimum pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 4.000 dan maksimum sebesar 5.000. Nilai rata-rata adalah 4.734, dan nilai standar deviasi adalah 0.247. Nilai minimum pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 4.000 dan maksimum sebesar 5.000. Nilai rata-rata adalah 4.686 dan nilai standar deviasi adalah 0.221. Nilai minimum pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 4.000 dan nilai tertinggi maksimum sebesar 5.000. Nilai rata-rata adalah 4.778, dan nilai standar deviasi adalah 0.410. Nilai rata-rata seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data pada variabel-variabel tersebut mampu dengan baik menggambarkan variasi data yang digunakan.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk memastikan apakah alat ukur yang digunakan telah memenuhi standar validitas dan reliabilitas yang terbukti relevan untuk menentukan kapasitas alat ukur (Ghozali, 2021).

Uji Validitas

Convergent Validity

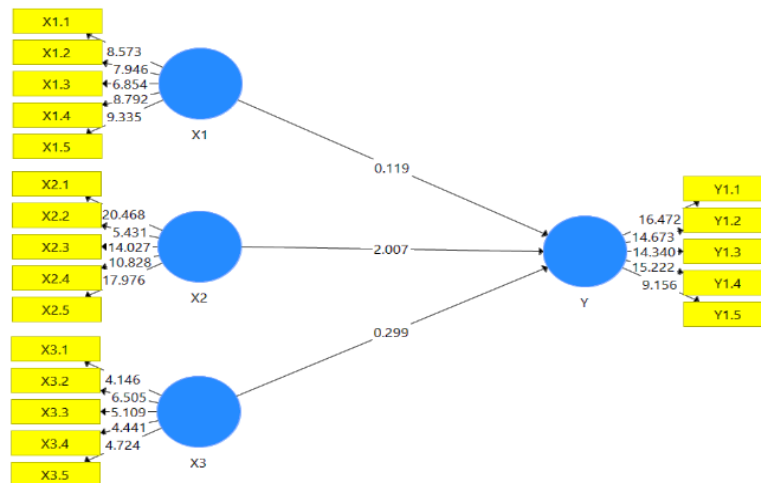
Tabel 5. Hasil *Convergent Validity*

	Pengendalian Internal (X1)	Sistem Akuntansi keuangan Daerah (X2)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
X1.1	0,832			
X1.2	0,830			
X1.3	0,824			
X1.4	0,906			
X1.5	0,909			
X2.1		0,950		
X2.2		0,721		
X2.3		0,908		
X2.4		0,861		
X2.5		0,946		
X3.1			0,774	
X3.2			0,939	
X3.3			0,886	
X3.4			0,802	
X3.5			0,789	
Y1.1				0,877
Y1.2				0,869
Y1.3				0,874
Y1.4				0,886
Y1.5				0,830

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *loading factor* yang terlihat dalam tabel di mana seluruh nilai sudah memenuhi syarat dengan nilai di atas 0,7, maka indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid atau memenuhi uji *convergent validity*.

Gambar 2. Loading Factor Model



Sumber : hasil *output* PLS diolah (2024)

Discriminant Validity

Tabel 6. Hasil Discriminant Validity

	Pengendalian Internal (X1)	Sistem Akuntansi keuangan Daerah (X2)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
X1.1	0,832			
X1.2	0,830			
X1.3	0,824			
X1.4	0,906			
X1.5	0,909			
X2.1		0,950		
X2.2		0,721		
X2.3		0,908		
X2.4		0,861		
X2.5		0,946		
X3.1			0,774	
X3.2			0,939	
X3.3			0,886	
X3.4			0,802	
X3.5			0,789	
Y1.1				0,877
Y1.2				0,869
Y1.3				0,874
Y1.4				0,886
Y1.5				0,830

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *loading factor* sudah memenuhi syarat dengan nilai di atas 0,7, maka indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid atau memenuhi memenuhi uji *discriminant validity*.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil AVE, Composite Reliability, Cronbach's Alpha

	AVE	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
PI (X1)	0,742	0,935	0,914
SAKD (X2)	0,777	0,945	0,926
PTI (X3)	0,706	0,923	0,902
KLK (Y)	0,753	0,938	0,918

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *average variance extracted* (AVE) lebih dari 0,5, nilai *composite reliability* dan *crobanch alpha* memiliki nilai lebih dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk dalam reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Menurut Ghozali (2021) analisis evaluasi model struktural (*inner model*) digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten, model struktural menggambarkan hubungan antar variabel laten yang telah dibangun. *Inner model* diestimasi dengan menggunakan uji *r-square* (R^2) dan *predictive relevance* (Q2).

R-Square (R^2)

Tabel 8. Hasil *R-Square Adjusted* (R2)

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kualitas Laporan Keuangan	0,274	0,222

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa *R-square* nilai kualitas laporan keuangan sebesar 0,274 dengan nilai *adjusted R-square* 0,222. Hal ini menunjukkan bahwa 22% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, sementara 78% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar penelitian ini.

Predictive Relevance (Q2)

Tabel 9. Hasil *Predictive Relevance* (Q2)

	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kualitas Laporan Keuangan	0,181

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *Q-square* yaitu 0,181 atau 18,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 18% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, sementara 82% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
X1 -> Y	-0,228	-0,026	0,235	0,119	0,905
X2 -> Y	0,496	0,507	0,247	2,007	0,045
X3 -> Y	0,066	0,107	0,221	0,299	0,765

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**
 Hasil pengujian hipotesis pada hubungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai koefisien jalur dengan hasil negatif dikarenakan mempunyai nilai original sampel sebesar -0,228 dengan rata-rata sampel sebesar -0,026. Nilai *p-value* sebesar 0,905 sehingga dapat ditolak karena *p-value* > 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 0,119 lebih kecil dari t-statistik 1,96. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa H1 ditolak, karena tidak adanya pengaruh positif dan signifikan hubungan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**
 Hasil pengujian hipotesis pada hubungan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai koefisien jalur dengan hasil positif dikarenakan mempunyai nilai original sampel sebesar 0,496 dengan rata-rata sampel sebesar 0,507. Nilai *p-value* menunjukkan sebesar 0,045 sehingga dapat diterima karena *p-value* < 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 2,007 lebih besar dari t-statistik 1,96. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa H2 diterima, karena adanya pengaruh positif dan signifikan hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**
 Hasil pengujian hipotesis pada hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai koefisien jalur dengan hasil positif dikarenakan mempunyai nilai original sampel sebesar 0,066 dengan rata-rata sampel sebesar 0,107. Nilai *p-value* menunjukkan sebesar 0,765 sehingga dapat ditolak karena *p-value* > 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 0,299 lebih kecil dari t-statistik 1,96. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa H3 ditolak, karena tidak adanya pengaruh positif dan signifikan hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pada hubungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai melalui *p-value* 0,905 > 0,05, dan nilai t-statistik sebesar 0,119 lebih kecil dari t-statistik 1,96. Maka diperoleh kesimpulan bahwa H1 ditolak, karena tidak adanya pengaruh positif dan signifikan hubungan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa

efektivitas pengendalian internal bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan ketika mengevaluasi keuangan pemerintah daerah. Pejabat pemerintah juga harus mampu memenuhi persyaratan lain agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gustina (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pengendalian internal, tetapi juga harus memenuhi aspek lain seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan. Dari hasil yang dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena penerapannya yang tidak tepat atau kurang memenuhi standar. Pengendalian internal yang kurang memadai gagal mencegah penipuan dan kesalahan, yang berdampak pada akurasi laporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Imelia *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Pemda Kerinci tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di bidang akuntansi, sehingga terbatasnya jumlah aparat dalam pemeriksaan internal pemerintah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pada sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai *p-value* $0,045 < 0,05$ nilai t-statistik sebesar 2,007 lebih besar dari t-statistik 1,96. Maka diperoleh kesimpulan bahwa H_2 diterima, karena adanya pengaruh positif dan signifikan hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sistem akuntansi yang efektif sesuai dengan standar yang berlaku tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah dipahami, memudahkan pengguna laporan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan sistem akuntansi yang terstruktur, risiko-risiko terkait dengan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan informasi keuangan dapat dikelola dengan lebih baik, menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jauhari *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem akuntansi keuangan daerah yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan baik dalam pengelolaan maupun pelaporan laporan keuangan. Dari hasil di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem akuntansi yang efektif harus memastikan keakuratan dan validitas data yang dimasukkan. Keakuratan ini penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang harus sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Gustina (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa nilai p -value $0,765 > 0,05$ dan nilai t -statistik sebesar $0,299$ lebih kecil dari t -statistik $1,96$. Maka diperoleh kesimpulan bahwa H_3 ditolak, karena tidak adanya pengaruh hubungan secara signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa usia dan lama masa bekerja tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbaikan atau membuat laporan sesuai dengan teknologi yang ada. Karena mereka masih menggunakan teknologi yang dahulu dan sudah terbiasa mengikuti teknologi tersebut, dikarenakan dominan responden yang berusia di atas 45 tahun ada 27 responden dengan persentase 58,69% dan yang bekerja selama 15 tahun ada 12 responden dengan persentase 26,08%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pangestu *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak digunakan secara dominan didalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan, efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada keterampilan dan pelatihan pengguna. Tanpa keahlian dalam penggunaan teknologi, peningkatan kualitas laporan tidak dapat tercapai. Selain itu, kualitas sistem teknologi informasi juga mempengaruhi akurasi data yang dihasilkan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adah & Nasrullah (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dalam penelitiannya mengatakan bahwa adanya keterbatasan teknologi yang dimiliki dan kemampuan sumber daya manusia yang tidak dapat mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam proses akuntansi dikarenakan dominan responden berusia di atas 45 tahun ada 19 responden dengan persentase 37,3%, di mana pada usia kategori tersebut responden cenderung sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat saat ini terlebih yang masa kerjanya sudah lebih dari 15 tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin dengan nilai t -statistik sebesar $0,119 < 1,96$ dan nilai p -value sebesar $0,905 > 0,05$.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin dengan nilai t -statistik sebesar $2,007 > 1,96$ dan p -value sebesar $0,045 < 0,05$.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin dengan nilai t -statistik sebesar $0,299 < 1,96$ dan nilai p -value sebesar $0,765 > 0,05$.

SARAN

1. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan peneliti, sehingga untuk peneliti selanjutnya agar bisa membagi waktu dengan baik, antara kegiatan di kampus dan di luar kampus dengan penelitian yang dilakukan.
2. Karena kurangnya partisipasi responden dalam menjawab pertanyaan, sehingga peneliti menyarankan untuk responden sebaiknya lebih memperhatikan dan membaca seksama terhadap pernyataan dan jawaban yang ada di kuesioner dalam penelitian, agar bisa memperoleh jawaban yang mutlak dan terpercaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Sari Yanti, S.E., M.M, Nadya Novianty, SE., MSA., Ak., CA dan Analisa, SE., Ak yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adah., Nasrullah, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 14-24
- Ajeng, I. S. P., Wahdan, (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. (Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin/article/view/8889>
- Barus, M. P. A. R., Harmain, H., Tambunan, K. (2023). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 56 Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*.1(4),51-73
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares* Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (3 ed).
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56-64
- Heinrich, A., Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 411-424
- Hidayat, D., Sari, M., AR, F. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1-13
- Imelia, D., Rahayu, S., Wiralestari. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. *JAKU: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(3), 149-163
- Jauhari, H., Hazisma, S., Dewata, E. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 104-121

- Koto, A. N. S. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45477/1/ANNISA%20NUR%20SAKINAH%20KOTO-FEB.pdf>
- Lestari, N. L. W. T & Dewi, N. N. S R T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Krisna (Kumpulan Riset Akuntansi)*, 11(2), 170-178
- Pangestu, M. E., Wafirotin, K. Z., Hartono, A. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 108-19PP. No. 41 (2007). Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- PP No. 21 (2011). Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *E-Proceeding of Management*, 6(1), 660– 66
- Sina, I. (2023). Banjarmasin Raih WTP ke-10 dari BPK RI. [https://aktualkassel.com/banjarmasin-raih-wtp-ke-10-dari-bpk-ri/\[diakses 10/03/2024\]](https://aktualkassel.com/banjarmasin-raih-wtp-ke-10-dari-bpk-ri/[diakses%2010/03/2024])
- Ramadhanti, S. A., Rufaedah, Y. (2023). pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (survei pada SKPD Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 261-269
- Tangko, I., Falah S., Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 2(1), 60-76
- Wibisono, F. H. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntans*, 12(2), 1061-1066
- Wulandari, A. D., & Yulianti, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jember). *Costing:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 637-649